

**DIALOG PEMIKIRAN PGI ERA REFORMASI DAN PEMIKIRAN
REINHOLD NIEBUHR MENGENAI PERAN POLITIK GEREJA
DALAM MENANGGAPI MASALAH KEKERASAN**

TESIS

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR**

MAGISTER SAINS TEOLOGI PADA FAKULTAS TEOLOGI



OLEH

Fritz Yohanes Dae Pany

50140004

FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**Dialog Pemikiran PGI Era Reformasi dan Pemikiran Reinhold Niebuhr Mengenai
Peran Politik Gereja dalam Menanggapi Masalah Kekerasan**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:
Fritz Yohanes Dae Pany (50140004)

dalam ujian Tesis Program Studi Magister Ilmu Teologi
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana
untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains Teologi
pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018.

Pembimbing I

Pembimbing II


Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D.


Bernard Adeney Risakotta, PhD

Penguji:

Tanda tangan

1. Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo, Th.M. :



2. Bernard Adeney Risakotta, Ph.D :



3. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D :



Disahkan oleh:




Pdt. Handi Hadiwitanto, PhD

Kaprosdi Magister Ilmu Teologi dan KKP

KATA PRAKATA

Ucap syukur bagi Tuhan Allah untuk kasih karunia-Nya. Menulis tesis ini membutuhkan kejelian, ketelitian, ketekunan, kesabaran, semangat dan kekuatan. Semua yang dibutuhkan itu dilimpahkan kepada penulis oleh Allah. Ada saat ini mana penulis ceroboh, tergesa-gesa dan loyo. Karya Allah sungguh menolong menumbuhkan ketelitian, kesabaran, semangat dan harapan. Sebab itu, menurut penulis, tepat, apabila dikatakan bila tesis ini dapat diselesaikan karena kasih karunia Tuhan Allah.

Tesis ini mengetengahkan persoalan penting bagi kehidupan gereja di Indonesia, yaitu peran politik. Gereja di Indonesia yang ada pada era reformasi wajib mengambil peran politik dalam menanggapi masalah kekerasan. Dalam menunaikan kewajibannya, gereja perlu mempunyai pemahaman yang lengkap mengenai kekerasan dan politik. Salah satu upaya untuk memperoleh pemahaman ini adalah melalui dialog. Sebab itu, tesis ini mengetengahkan dialog pemikiran antara PGI era reformasi dan Reinhold Niebuhr.

Penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini sendiri. Banyak pihak memberi andil dalam penulisan. Sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Vonni Puspasari, Peter Suwito Dae Pany, dan Misael Abdi Dae Pany, isteri dan anak-anak. Kesabaran, ketabahan, dukungan dan keceriaan yang ditaburkan yang bermanfaat besar.

Penulis juga hendak menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada bapak Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D, dan Prof. Bernard Adeney Risakota, Ph.D, yang memberi sumbangan kritis dan motivasi tinggi selama membimbing penulisan, sampai ujian. Selain membimbing, keduanya juga menguji tesis bersama dengan bapak Pdt. Joko Prasetyo. Ketiga dosen penguji mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang membuka pengembangan dan pikiran-pikiran baru terkait dengan peran politik gereja dalam menanggapi masalah kekerasan.

Kepada Ibu, mertua dan seluruh keluarga besar, juga, penulis haturkan terima kasih. Mereka membantu, menolong dan mendorong dalam masa sulit dan berat. Mereka bagaikan malaikat-malaikat Tuhan yang tidak bersayap. Rasa hormat dan terima kasih juga penulis

haturkan kepada Majelis GKJ Manahan dan seluruh jemaat. Dukungan yang gigih dan tidak kenal lelah dicurahkan. Air mata dicururkan, tangis dan seru doa tak henti sampaikan untuk penulis ketika belajar, kecelakaan, penyembuhan, pemulihan, sampai ujian tesis. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, khususnya program studi pasca sarjana angkatan 2014. Motivasi, keceriaan, canda, yang diberikan sungguh menyejukkan dan menyegarkan hati, pikiran dan perasaan. Juga untuk keluarga besar sinode GKJ: mulai dari pejabat sinode, sampai rekan-rekan pendeta, yang mendukung, menghibur, dan menguatkan saya dalam kuliah dan penyusunan tesis. Perlu penulis sampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang telah berjasa besar bagi dalam menyelesaikan tesis ini tetapi belum disebutkan namanya.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih berlimpah kekurangan dan masih perlu pengembangan lanjut supaya benar-benar berguna. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tesis ini menjadi lebih baik.

Harapan penulis, tesis ini memberi sumbangan wacana yang bermanfaat banyak dalam diskusi tentang peran politik gereja di Indonesia, khususnya dalam menanggapi masalah kekerasan.

Yogyakarta, Oktober 2018

Fritz Yohanes Dae Pany

DAFTAR ISI

Bab I. Pendahuluan

1. Latar belakang masalah.....	1
2. Rumusan masalah.....	8
3. Batasan masalah.....	10
4. Judul tesis.....	15
5. Metode.....	16
6. Sistematika.....	17

Bab II. Tanggapan politik Gereja terhadap masalah kekerasan dalam perspektif PGI era reformasi 1998-2015

Pengantar.....	19
1. Sekilas pandang tentang PGI.....	20
2. Kekerasan menurut PGI.....	22
2.1. Faktor-faktor pendorong terjadinya kekerasan.....	24
2.2. Kekerasan dan hancurnya tatanan kehidupan.....	30
3. Kekerasan sebagai tindakan yang buruk moral dan bertentangan dengan iman Kristen: tinjauan moral dan teologis.....	32
4. Politik menurut PGI.....	35
4.1. Faktor-faktor dalam politik.....	36
4.2. Dasar teologis peran politik PGI.....	38
4.3. Negara sebagai hamba Allah.....	40
4.4. Bukan subordinasi, tetapi koordinasi: hubungan Gereja-Negara.....	41
4.5. Tujuan politik Gereja dan kekuasaan.....	42
5. Tiga sikap politik PGI dalam persoalan kekerasan: Nabi yang bisu, ragu dan berseru.....	43
5.1. Nabi yang bisu.....	44
5.2. Nabi yang ragu.....	47
5.3. Nabi yang berseru.....	48
6. Ringkasan.....	54

Bab III. Tanggapan politik Gereja terhadap masalah kekerasan dalam perspektif Reinhold Niebuhr

Pengantar.....	56
1. Sekilas tentang Reinhold Niebuhr.....	57
2. Kekerasan tak terhindarkan.....	61
2.1. Kekerasan sebagai alat.....	61
2.2. Sisi ganda dampak kekerasan: positif dan negatif.....	64
2.3. Faktor-faktor pendorong terjadinya kekerasan.....	65
2.4. Kekerasan dan dosa: perspektif teologis.....	68
2.5. Kekerasan adalah buruk dan tidak buruk: tinjauan moral.....	71
3. Politik sebagai seni mengolah kehidupan bersama.....	73

3.1. Politik dan kekuasaan.....	74
3.2. Politik dan paksaan (<i>coercion</i>).....	76
3.3. Politik dan kata hati (<i>conscience</i>).....	79
4. Gereja, politik dan kekerasan a la Reinhold Niebuhr.....	81
4.1. Gereja dan hukum kasih.....	81
4.2. Tujuan kehadiran Gereja.....	82
5. Peran politik gereja menanggapi masalah kekerasan: membangun semangat kasih dan pertobatan dalam kehidupan politik.....	84
6. Ringkasan.....	91

Bab IV. Dialog pemikiran PGI dan pemikiran Reinhold Niebuhr tentang peran politik Gereja dalam menanggapi masalah kekerasan

Pengantar.....	93
1. PGI dan Reinhold Niebuhr yang berbeda tetapi sama-sama prihatin.....	94
2. Bagaimana gereja-gereja di Indonesia memandang kekerasan?.....	94
2.1. Kekerasan bukan sekedar kekerasan.....	95
2.2. Bentuk-bentuk kekerasan.....	99
2.3. Faktor-faktor penyebab kekerasan.....	100
2.4. Dampak kekerasan.....	113
3. Tinjauan moral dan teologis mengenai kekerasan.....	115
4. Peran politik Gereja menanggapi masalah kekerasan.....	119
4.1. Dasar-dasar teologis-sosiologis Gereja dalam menanggapi secara politik masalah kekerasan.....	122
4.2. Pandangan Gereja terhadap Negara.....	124
4.3. Sikap politik Gereja menanggapi masalah kekerasan.....	125
5. Ringkasan.....	128

Bab V. Kesimpulan

Pengantar.....	131
1. Memahami kekerasan.....	132
2. Meninjau kekerasan dari perspektif moral dan teologis.....	133
3. Memahami politik a la PGI dan Reinhold Niebuhr.....	134
4. Menanggapi masalah kekerasan secara politik.....	136

5. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan Gereja dalam menanggapi masalah kekerasan.....137

Daftar Pustaka.....138

©UKDWN

ABSTRAK

Kekerasan merupakan salah satu persoalan di Indonesia yang menonjol pada era reformasi. Banyak pihak menanggapinya. Gereja, khususnya PGI, adalah salah satu pemangku kepentingan bangsa Indonesia yang ikut menanggapinya. Menarik, PGI menanggapinya dari sudut pandang politik. Semakin semarak, manakala pemikiran politik PGI didialogkan dengan pemikiran Reinhold Niebuhr: teolog, etikus dan pengamat politik yang hidup dan berkarya di Amerika Serikat yang berbeda secara konteks dengan PGI. Dengan demikian argumentasi-argumentasi gereja di Indonesia dalam menanggapi secara politik masalah kekerasan, pun, semakin banyak.

Salah satu tujuan tesis ini adalah memaparkan dan menganalisa pemikiran PGI era reformasi dan Reinhold Niebuhr seputar kekerasan, politik dan gereja. Gereja dan pemangku-pemangku kepentingan yang lain yang ada di Indonesia wajib mengetahui factor-faktor yang mendorong tindakan kekerasan, menilai kekerasan dari berbagai sudut pandang, serta menaggapinya secara bijak dan lengkap. Khususnya menanggapi kekerasan secara politik. Tujuan lebih lanjut adalah untuk mengemukakan gagasan-gagasan bagi gereja-gereja di Indonesia dan pihak yang lain dalam menganggapi secara politik masalah kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas maka dibutuhkan data-data sah dan yang berasal dari sumber primer. Sebagai Lembaga, PGI memiliki alat-alat kelengkapan yang menghasilkan dokumen-dokumen politik yang menanggapi persoalan kekerasan. Dokumen-dokumen inilah yang dipaparkan dan dianalisa. Sebagai penulis yang produktif, Reinhold Niebuhr, menghasilkan banyak karya tulis yang membahas masalah kekerasan politik. Akhirnya data-data pemikiran tersebut didialogkan dan menghasilkan pemikiran-pemikiran menarik bagi gereja-gereja di Indonesia dan pihak yang lain dalam rangka menanggapi secara politik persoalan kekerasan. Kekerasan perlu dilihat sebagai kekerasan, alat untuk mencapai tujuan atau kepentingan, dan instrumen dalam politik.

Penelitian pemikiran-pemikiran politik dalam menanggapi masalah kekerasan yang mendalam ini menghasilkan pemikiran yang semakin kaya dan beragam dan membantu dalam menanggapi secara lebih bijak dan lengkap persoalan kekerasan di Indonesia.

PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, September 2018



Fritz Yohanes Dae Pany

ABSTRAK

Kekerasan merupakan salah satu persoalan di Indonesia yang menonjol pada era reformasi. Banyak pihak menanggapinya. Gereja, khususnya PGI, adalah salah satu pemangku kepentingan bangsa Indonesia yang ikut menanggapinya. Menarik, PGI menanggapinya dari sudut pandang politik. Semakin semarak, manakala pemikiran politik PGI didialogkan dengan pemikiran Reinhold Niebuhr: teolog, etikus dan pengamat politik yang hidup dan berkarya di Amerika Serikat yang berbeda secara konteks dengan PGI. Dengan demikian argumentasi-argumentasi gereja di Indonesia dalam menanggapi secara politik masalah kekerasan, pun, semakin banyak.

Salah satu tujuan tesis ini adalah memaparkan dan menganalisa pemikiran PGI era reformasi dan Reinhold Niebuhr seputar kekerasan, politik dan gereja. Gereja dan pemangku-pemangku kepentingan yang lain yang ada di Indonesia wajib mengetahui factor-faktor yang mendorong tindakan kekerasan, menilai kekerasan dari berbagai sudut pandang, serta menaggapinya secara bijak dan lengkap. Khususnya menanggapi kekerasan secara politik. Tujuan lebih lanjut adalah untuk mengemukakan gagasan-gagasan bagi gereja-gereja di Indonesia dan pihak yang lain dalam menganggapi secara politik masalah kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas maka dibutuhkan data-data sah dan yang berasal dari sumber primer. Sebagai Lembaga, PGI memiliki alat-alat kelengkapan yang menghasilkan dokumen-dokumen politik yang menanggapi persoalan kekerasan. Dokumen-dokumen inilah yang dipaparkan dan dianalisa. Sebagai penulis yang produktif, Reinhold Niebuhr, menghasilkan banyak karya tulis yang membahas masalah kekerasan politik. Akhirnya data-data pemikiran tersebut didialogkan dan menghasilkan pemikiran-pemikiran menarik bagi gereja-gereja di Indonesia dan pihak yang lain dalam rangka menanggapi secara politik persoalan kekerasan. Kekerasan perlu dilihat sebagai kekerasan, alat untuk mencapai tujuan atau kepentingan, dan instrumen dalam politik.

Penelitian pemikiran-pemikiran politik dalam menanggapi masalah kekerasan yang mendalam ini menghasilkan pemikiran yang semakin kaya dan beragam dan membantu dalam menanggapi secara lebih bijak dan lengkap persoalan kekerasan di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan bencana yang benar-benar dahsyat yang menghantam bangsa Indonesia di era Reformasi. Bencana ini tentu sangat mengejutkan seluruh bangsa Indonesia, bahkan dunia. Menurut beberapa kalangan, sebelum era reformasi Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Maksud dari pandangan ini adalah menunjukkan tentang kehidupan bangsa Indonesia yang jauh dari kekerasan. Kekerasan bukan merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa awal reformasi yang kental dengan kekerasan, dengan demikian, menjungkirbalikkan pandangan keramahan dan kesantunan tersebut.

Pandangan yang demikian tentu berlebihan, bahkan tidak benar. Sejarah mencatat dengan tinta darah dan menunjukkan bahwa kekerasan terus mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa kekerasan besar yang melekat dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, misalnya, peristiwa DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang lebih dikenal sebagai gerakan 30 S PKI, peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 1974, peristiwa Tanjung Priok 1984, rentetan peperangan dan kekerasan di Aceh, Timor-Timur (sekarang merupakan negara Timor Leste), Papua dan seterusnya. Kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam era Reformasi, khususnya yang terjadi pada masa awal reformasi, juga merupakan malapetaka besar bagi bangsa Indonesia yang pada masa awal menjelang reformasi sedang disapu oleh badai krisis ekonomi. Gelombang kekerasan yang menghantam menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang digempur oleh krisis multiwajah.

Pada era Reformasi, kekerasan melanda hampir seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Aceh, ujung barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikenal sebagai serambi Mekah, nyawa-nyawa manusia seolah tiada berharga, begitu gampang orang menebasnya. Peristiwa Darurat Militer I, Darurat

Militer II, Darurat Sipil, Aceh Singkil mengisahkan dengan lantang ngerinya kekerasan. Di Papua, ujung timur Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, negeri yang bergelimang emas, kekerasan bagaikan hantu ganas yang sangat menakutkan yang tidak mengenal waktu istirahat, terus bekerja menghancurkan kehidupan masyarakat. Di Kalimantan, dalam peristiwa Sampit dan Sambas misalnya, relasi-relasi antar manusia dan kelompoknya tercabik-cabik oleh tajamnya kekerasan. Di Poso, Sulawesi, di bagian tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekerasan menjadi kuda tunggangan dalam perebutan kekuasaan yang dicampur aduk dengan ideologi-ideologi agama. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan Banten dalam peristiwa Mei 1998 misalnya, kekerasan memahat dalam sejarah di mana jutaan hati manusia yang tersayat membekas sepanjang hayat.

Yang telah diketengahkan di atas adalah sebaran kekerasan yang terjadi di Indonesia dengan bentuk kekerasan massa atau kekerasan kelompok dengan jumlah massa yang besar. Apabila kekerasan massa dengan jumlah kelompok yang lebih kecil seperti dalam aksi *sweeping* oleh kelompok intoleran,¹ tawuran antar kelompok; kemudian kekerasan individual yang terjadi di ranah publik dan domestik ditambahkan dalam ulasan tadi, maka akan semakin jelas wajah beringas kekerasan yang mengerikan. Sebabnya adalah karena kasus-kasus kekerasan, khususnya kekerasan individual yang terjadi di ruang publik dan domestik, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengkonfirmasi peningkatan jumlah kekerasan. Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2011 sebanyak 2178 kasus kekerasan, tahun 2012 sejumlah 3512 kasus, tahun 2013 sebanyak 4311 kasus, dan tahun 2014 sejumlah 5066 kasus.² Demikian juga dengan kasus kekerasan di mana kaum perempuan menjadi korbannya. Kehidupan individual dan sosial warga masyarakat Indonesia, dengan demikian, jelas sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekerasan-kekerasan yang terjadi.

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam, diunduh tanggal 15 Nopember 2017.

² <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diunduh pada tanggal 19 April 2016.

Ngerinya wajah kekerasan di Indonesia era reformasi semakin jelas ketika dampak-dampak kekerasan tersebut diperhatikan dengan seksama. Dalam ruang yang sangat terbatas ini paling tidak kita bisa memperhatikan dengan seksama dampak kekerasan terhadap kehidupan individual-sosial, serta dampak ekonomi, melalui beberapa kasus konflik dan kekerasan. Pertama, dampak ekonomi. Konflik dan kekerasan di Aceh yang melibatkan pihak Gerakan Aceh merdeka (GAM), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan masyarakat di sekitarnya yang terjadi pada tahun 2000. Akibat konflik ini LIN-RI menyebutkan bahwa PT Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI) sempat menutup perusahaan dan mengungsikan para karyawan warga negara asing ke Medan, Sumatera Utara.³ Dalam laporan yang sama LIN-RI menyebutkan bahwa PT EMOI dan PT Arun NGL Co merupakan penyumbang devisa dari sektor migas yang besar (30-40%) bagi Indonesia pada jaman orde baru.⁴ Dengan ditutupnya (untuk sementara) PT EMOI, maka berakibat pada turunnya devisa negara dari sektor migas. Dengan menurunnya jumlah devisa negara, jelas akan mempengaruhi kinerja pemerintah. Program-program pembangunan pemerintah tidak berjalan seperti yang direncanakan karena kurangnya dana. Kiranya menjadi jelas bahwa konflik dan kekerasan mengakibatkan roda perekonomian yang tersendat.

Konflik dan kekerasan kedua yang menunjukkan dampak ekonomi yang besar adalah kekerasan di Jakarta pada tahun 1998 dalam masa transisi orde baru dan orde reformasi. Mengenai hal ini Kwik Kian Gie menulis:

Dalam bidang distribusi, kondisinya sudah porak poranda dengan terbakar dan ditutupnya pusat perdagangan grosir Manggadua. Sudah terstruktur sejak lama bahwa para produsen yang tidak mempunyai jaringan distribusi sendiri, dapat mendistribusikan barangnya ke semua penjuru pelosok Tanah Air dengan mendrop barangnya di Manggadua (dahulu Pasarpagi). Melalui jaringan tidak formal antarwarganegara keturunan Tionghoa, barang akan merembes ke seluruh pelosok Tanah Air. Ini yang sekarang terganggu. Seperti dikatakan tadi, pusatnya, yaitu Manggadua dibakar. Yang di daerah-daerah ada yang dibakar. Kalaupun tidak dibakar, toko-tokonya banyak sekali yang dirampok, orangnya dipukuli, sehingga mereka ketakutan setengah mati. ...”⁵

³ Tim Lembaga Informasi Nasional (LIN-RI) Republik Indonesia, *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi*. (Yogyakarta: Impedham, 2004). p. 44.

⁴ Ibid, p 37.

⁵ Kwik Kian Gie, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), p. 38-39.

Kekerasan di Jakarta menghentikan proses perdagangan. Berhentinya aktivitas perdagangan di pusat-pusat distribusi nasional barang-barang perdagangan secara otomatis menghentikan peredaran barang-barang dagang dalam skala nasional. Putusnya nadi perekonomian di Jakarta telah melumpuhkan tatanan perekonomian Indonesia. Demikianlah dampak makro kekerasan di Jakarta terhadap perekonomian Indonesia. Dampak ini diderita bukan hanya oleh para pengusaha yang berlatar belakang etnis Tionghoa yang ada di Manggadua, tetapi juga diderita oleh pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan para pengusaha tersebut. Mereka antara lain para buruh yang bekerja kepada para pemilik toko, profesi-profesi lain yang mempunyai hubungan dengan usaha yang ada di Manggadua (seperti transportasi, penginapan dan yang lainnya), dan keluarga dari pihak-pihak yang telah disebutkan yang menggantungkan kehidupannya pada pekerjaan dan usahanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik dan kekerasan telah mengakibatkan koyaknya sistem sosial-ekonomi masyarakat.

Kedua, dampak kehidupan sosial individual masyarakat. Masih tentang kasus konflik dan kekerasan di Aceh. Dampak kekerasan yang terjadi di Aceh bagi kehidupan adalah tercabiknya kehidupan individual dan sosial masyarakat. Dalam laporannya, LIN-RI menulis:

TNI telah mengklaim menewaskan 2.879 anggota GAM, yang menyerahkan diri berjumlah 1.954, dan 1.798 orang berstatus tawanan. Menurut pihak TNI, dari tiga status darurat di Aceh, pada DM I (Mei-November 2003) anggota GAM tewas sebanyak 1.588 orang, pada DM II (November 2003-Mei 2004) sebanyak 851 orang, dan pada Darurat Sipil (yang dimulai sejak 29 Mei 2004) sebanyak 440 orang. Singkatnya, jumlah anggota GAM yang dilumpuhkan, baik tewas, ditawan, maupun menyerahkan diri, sejumlah 6.622 orang.⁶

Data tersebut bukan hanya masalah angka, tetapi menunjuk kepada person-person dan relasi sosial. Ribuan orang meninggal. Akibatnya, orang kehilangan secara permanen anggota keluarga, sahabat, teman dan tetangga; dan, jumlah mereka berlipat-lipat dari jumlah orang yang meninggal. Ribuan orang kehilangan secara permanen atau kehilangan sementara karena anggota keluarga, sahabat, orang tua atau anak yang

⁶ Tim Lembaga Informasi Nasional (LIN-RI) Republik Indonesia, *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi*.p.56.

ditangkap atau yang dinyatakan hilang. Relasi-relasi sosial masyarakat tercabik-cabik oleh kekerasan. Data-data tersebut belum mengungkap kerusakan material dan lingkungan yang besar yang disebabkan oleh kekerasan. Mengenai akibat ini Fisher menulis:

Setelah terjadi kekerasan yang intensif, akibatnya yang berupa kerusakan fisik mudah sekali terlihat: kerusakan gedung-gedung, individu atau masyarakat yang tergusur dan harus mengungsi, hilangnya layanan masyarakat, dan dalam beberapa kasus ribuan orang yang meninggal atau hilang. Namun demikian, kerusakan yang lebih mendalam, yang tidak terlihat di permukaan, adalah yang terjadi di dalam pikiran dan hati masyarakat....Kekerasan merupakan pola abnormal yang membuat kacau dan menghancurkan sistem tradisional perilaku dan interaksi manusia. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat menjadi hancur dan digantikan oleh etika perang, hubungan antarpribadi runtuh, dan suatu masyarakat atau bangsa sering menjadi terpecah belah dan tercerai berai. Masyarakat merasakan trauma dan menderita kerusakan, banyak di antaranya kehilangan teman, dan anggota keluarga...⁷

Howard Clinebell berpendapat bahwa pengalaman kehilangan anggota keluarga mengakibatkan krisis kehidupan. Kematian suami/isteri, keluarga dekat, sahabat dekat dan kehilangan teman mengakibatkan stres dan kedukaan.⁸ Akibat lanjutan dari stress dan kedukaan adalah sakit fisik dan menurunnya produktivitas. Dari kasus di Aceh dampak kekerasan bagi masyarakat bukan hanya kehilangan, stress dan berduka, tetapi kepentingan mereka untuk hidup, sehat, sejahtera dan bebas dari rasa takut tidak terpenuhi.

Kekerasan yang sedemikian telah menarik banyak kalangan untuk menanggapi. Pemerintah bereaksi dengan mengirimkan aparat keamanan serta penegak hukum. Dengan menggunakan kekuasaan, peralatan dan kekuatannya, aparat menghentikan kekerasan. Terkadang aparat menghentikan kekerasan dengan menggunakan kekerasan. Diutus pula oleh pemerintah duta-duta untuk bersama dengan tokoh masyarakat dan agama serta pihak-pihak yang berkonflik untuk berdialog menangani konflik dan kekerasan yang ada. Para sukarelawan dari berbagai komunitas masyarakat bergegas menolong para korban. Gambaran tentang kerjasama berbagai

⁷ Simon Fisher dkk, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Bertindak*. (Jakarta: The British Council Indonesia), p. 125.

⁸ Howard Clinebell, *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*. (Yogyakarta dan Jakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 2002), p. 244-247.

pihak dalam menganggapi kekerasan juga dapat dilihat jelas dalam konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2001 yang dikenal oleh kalangan luas dengan istilah konflik Sampit. Laporan tim peneliti LIN-RI menyebutkan berbagai hal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan besar dalam penanganan kekerasan tersebut. Para pemuka etnis Dayak dan Madura mengadakan dialog di Jakarta dan di daerah yang lain. Para pemuka agama di Kalimantan Tengah juga mengadakan pertemuan untuk memikirkan langkah-langkah penanganan kekerasan dan konflik. Masih banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak yang dilaporkan oleh tim peneliti. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tulisan itu menunjukkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemuka etnis Dayak dan Madura, Polisi, TNI, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang lain dalam menangani kekerasan.⁹

Masih tentang kekerasan yang mengundang banyak kalangan untuk menanggapi. Komunitas masyarakat berbasis agama, budaya, politik, hukum, dan seterusnya di berbagai tempat mengadakan kajian maupun refleksi setelah terjadinya kekerasan. Buku-buku dihasilkan dalam kajian dan refleksi tersebut. Dari Makasar, Sulawesi Selatan, yayasan Oase dari Sekolah Tinggi Teologia Intim menerbitkan buku kumpulan tulisan yang berjudul "Teologi Bencana. Pergumulan Iman dalam Konteks Bencana Alam dan Bencana Sosial."¹⁰ Di dalamnya refleksi-refleksi terhadap masalah kekerasan dikemukakan. Dari Jakarta, pada tahun 2006 penerbit Mizan menerbitkan buku berjudul "Menjadi Indonesia. 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara."¹¹ Di dalamnya dikemukakan kajian dan refleksi dari kalangan Islam mengenai masalah kekerasan terhadap kaum perempuan yang dibenarkan oleh produk hukum negara Republik Indonesia. Kajian dan refleksi yang menarik juga dilakukan oleh Persekutuan gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada tahun 1998 dan tahun 2000. Hasil kajian dan

⁹ Tim Lembaga Informasi Nasional (LIN-RI) Republik Indonesia, *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi*. p. 321-337

¹⁰ Lihat, Ati Hildebrandt Rambe, Markus Hildebrandt Rambe dan Jilles de Klerk (Penyunting), *Teologi Bencana: Pergumulan Iman dalam Konteks Bencana Alam dan Bencana Sosial*, Makasar: Oase Intim, 2006.

¹¹ Lihat, Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Eds), *Menjadi Indonesia 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Jakarta: Mizan, 2006.

refleksi tersebut dibukukan pada tahun 2005 dan ada dua judul buku yang diterbitkan.¹² Kajian dan refleksi yang dilakukan oleh PGI tersebut merupakan salah satu wujud tanggapannya terhadap kekerasan. Masih sangat banyak buah kajian dan refleksi dari berbagai komunitas-komunitas yang menanggapi masalah kekerasan.

Masih ada lagi tanggapan komunitas-komunitas itu. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama komunitas-komunitas tersebut menanggapi kekerasan dengan membuat pernyataan dan sikap. Oleh sebagian golongan kekerasan dikutuk keras, tetapi oleh golongan yang lain tindak kekerasan itu dipuji dan disetujui. Melalui pernyataan-pernyataannya, sebagian golongan yang menolak dan mengutuk kekerasan menyerukan agar tindak kekerasan dihentikan, diungkap secara terbuka dan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, komunitas-komunitas masyarakat juga menyampaikan sikap politiknya kepada pemerintah dalam menanggapi masalah kekerasan yang terjadi dan bagaimana mengantisipasinya. Gereja merupakan salah satu komunitas yang turut menyatakan sikap politiknya kepada pemerintah terkait dengan tanggapannya terhadap masalah kekerasan di Indonesia dalam era Reformasi. Sikap politik ini menurut penyusun merupakan salah satu wujud peran politik gereja. Jadi, yang penyusun artikan dengan peran politik dalam studi ini adalah upaya gereja baik secara pribadi maupun kelompok menyatakan sikap dan pandangannya kepada pemerintah terkait dengan masalah kekerasan.

Peran politik gereja-gereja di Indonesia dalam era reformasi seperti telah dijelaskan di depan sangat menarik bagi penulis untuk diperhatikan. Ketertarikan inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam hal-hal yang terkait dengan peran politik gereja dalam menanggapi masalah kekerasan. Ketertarikan ini tidak lepas dari pengaruh diskusi mengenai persoalan etika, kekerasan, dan politik dalam kelas-kelas kuliah yang di dalamnya penyusun melibatkan diri. Dalam kelas-kelas tersebut penyusun melihat persoalan sosial, politik, kekerasan dan peran agama tidaklah sederhana dan memiliki kaitan erat satu dengan yang lain. Demikianlah latar belakang

¹² Lihat, Einar M. Sitompul (Editor), *Agama-Agama dan Rekonsiliasi*, Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), 2005; Einar M. Sitompul, *Agama-agama dalam Konflik: Mencari Format Kehadiran Agama-agama dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), 2005.

singkat yang menarik penyusun untuk mengkaji masalah peran politik gereja-gereja di Indonesia dalam era reformasi dalam menanggapi masalah kekerasan.

2. Rumusan Masalah

Dari sekian banyak lembaga gereja, penulis tertarik untuk mengkaji peran politik PGI. Mengapa? Bagi penyusun, di antara lembaga-lembaga gerejawi yang ada di Indonesia, PGI adalah lembaga gereja yang paling dikenal. Nama PGI dan beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya sering penyusun dengar dan baca dalam tulisan. Hal yang demikian wajar terjadi karena penyusun merupakan anggota gereja GKJ (Gereja Kristen Jawa): salah satu sinode gereja yang turut membidani lahirnya PGI.¹³ Meskipun penyusun merasa mengenal PGI, namun banyak sekali hal yang tidak penyusun ketahui tentang PGI. Lebih lagi mengenai peran politik PGI dalam era reformasi dalam menanggapi masalah kekerasan.

Beberapa teolog memang telah membahas kiprah politik PGI di Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul “Meniadakan atau Merangkul? Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik di Indonesia,” Mojau menunjukkan peran PGI dalam kebijakan politik era Orde Baru. Mojau meninjau secara cermat pengaruh teologi sosial gereja (perorangan maupun lembaga) terhadap hubungan antara gereja dan Islam politik di Indonesia. Mojau, juga, menunjukkan teolog-teolog lain yang membahas peran politik gereja-gereja di Indonesia. Mengenai hal ini Mojau menulis:

Selama ini telah ada beberapa studi tentang Kekristenan Protestan di Indonesia. Kita dapat menyebutkan di sini, misalnya: (a) studi yang dilakukan Zakaria J. Ngelow yang berusaha mengungkapkan peranan umat Kristen Protestan di Indonesia selama pergerakan kebangsaan pada kurun waktu 1900-1950; (b) studi yang dilakukan oleh Alla Gabe Hoekema, yang secara khusus memberi perhatian pada “kemunculan teologi Protestan Nasional di Indonesia seiring dengan kemunculan kesadaran nasionalisme di Indonesia” sekitar 1860-1960; (c) studi yang dilakukan Karel Ph. Erari, yang membahas secara khusus tentang bagaimana pandangan teologis Dewan Gereja-gereja di Indonesia tentang masalah kemiskinan dan pembebasan dari kemiskinan selama dasawarsa 60-an dan 70-an, dan (d) studi yang dilakukan oleh Saut

¹³ Lihat Hadi Purnomo dan M. Suprihadi Sastrosupono (penyunting), *Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ): Benih yang Tumbuh dan Berkembang di Tanah Jawa*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, p.37.

Sirait, yang secara khusus memberi perhatian pada peran politik Kristen Protestan di Indonesia. Selain itu, sekalipun hanya menyinggung pada bagian tertentu, kita perlu juga mencatat usaha yang dilakukan oleh A.A. Yewangoe, yang berusaha mencatat pandangan-pandangan teologis gereja-gereja dan beberapa teolog Kristen (Protestan dan Katolik) tentang penderitaan.¹⁴

Para teolog yang telah disebutkan diatas telah melakukan studi peran politik gereja-gereja di Indonesia. Akan tetapi, belum ada yang secara khusus melakukan studi tentang peran politik PGI dalam era reformasi dalam merespon masalah kekerasan. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan studi mengenai peran politik PGI dalam era reformasi dalam menanggapi masalah kekerasan.

Lebih dari pada itu, penyusun juga bermaksud untuk mengkaji pemikiran yang lain yang juga memikirkan tentang peran politik gereja dalam menanggapi masalah kekerasan. Pemikiran siapa yang hendak dikaji? Karena kekerasan merupakan masalah global, masalah yang dihadapi oleh semua manusia di seluruh muka bumi disepanjang abad, maka penyusun mempertimbangkan untuk mengkaji pemikiran dari luar Indonesia. Pertimbangan yang lain adalah masalah keterkaitan pemikiran. Maksudnya, pemikiran-pemikiran yang sedikit banyak mempengaruhi pemikiran PGI dalam merespon secara politik masalah kekerasan. Siapakah pemikir yang sekiranya mempengaruhi pemikiran PGI dalam masalah ini? Dengan mempertimbangkan secara singkat sejarah gereja-gereja Protestan di Indonesia yang turut membidani lahirnya PGI yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan gereja-gereja di Eropa maka dapat dipastikan adanya pengaruh-pengaruh pemikiran teologi dari Eropa secara perorangan maupun komunitas terhadap pemikiran teologi PGI. Juga dengan mempertimbangkan pemikir-pemikir dari Amerika yang patut diduga mempunyai hubungan pemikiran dengan sosok-sosok yang pernah terlibat di PGI maka dapat diduga pula adanya pemikir-pemikir Amerika yang turut mempengaruhi pemikiran teologis person-person yang mewarnai pemikiran PGI. Mengenai pribadi-pribadi yang turut mempengaruhi PGI Mojau menyebutkan antara lain T.B. Simatupang dan Pdt. Eka Darmaputera. Kedua tokoh ini pemikirannya dekat dengan Reinhold Niebuhr, salah seorang teolog dan etikus abad keduapuluh yang berpengaruh besar di Amerika Serikat. Maksudnya,

¹⁴ Julianus Mojau, *Meniadakan atau Merangkul? Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik di Indonesia*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012). p. 5-6.

pemikiran-pemikiran kedua teolog memiliki kedekatan dengan pemikiran Reinhold. Simatupang sendiri mengatakan kedekatannya dengan pemikiran realisme Reinhold:

Namun sebenarnya karya Reinhold Niebuhr telah meninggalkan kesan yang jauh lebih kuat, terutama ketika saya memikirkan ulang, di dalam perspektif teologis, tentang perjuangan nasional bagi kebebasan dan keadilan, di mana saya telah terlibat di dalamnya sejak tahun empat puluhan. Karya Niebuhr, *The Nature and Destiny of Man* memberikan kepada saya sebuah kunci untuk memahami perjuangan bagi pembebasan dan keadilan secara lebih realistis dan sekaligus lebih memberikan pengharapan. Ia memberikan kepada saya sebuah pemahaman yang segar tentang masyarakat Barat modern, yang pada satu pihak kami perangi dengan hebatnya tetapi, pada pihak yang lain, di dalam beberapa hal berusaha untuk kami samai.¹⁵

Relasi pemikiran Reinhold-Simatupang-Eka dan PGI menarik perhatian penyusun untuk mengkaji pemikiran Reinhold Niebuhr.

Berdasarkan uraian di atas, maka studi ini bermaksud mengkaji peran politik PGI era reformasi dan Reinhold dalam menanggapi masalah kekerasan. Perlu ditekankan lagi, yang dimaksud dengan peran politik di sini adalah upaya gereja baik secara pribadi maupun kelompok dalam menyatakan sikap dan pandangannya kepada pemerintah terkait dengan masalah kekerasan. Rumusan masalah dalam studi ini, dengan demikian menjadi sebagai berikut:

1. Apa sikap politik PGI era Reformasi dan Reinhold Niebuhr terhadap masalah kekerasan?
2. Mengapa PGI era reformasi dan Reinhold Niebuhr mengambil sikap politik seperti itu dalam menanggapi masalah masalah kekerasan, dan bagaimana dialog di antara kedua pemikiran tersebut?

3. Batasan Masalah

Batasan pertama, PGI dan Reinhold Niebuhr. Peran politik wadah himpunan gereja-gereja yang lain, seperti KWI, PGLII, PGPI dan sebagainya tidak akan dibahas dalam tesis ini. Hal ini disebabkan bukan karena ketiadaan atau kurangnya peran politik

¹⁵ T.B. Simatupang, *Kehadiran Kristen Dalam Perang, Revolusi dan Pembangunan: Berjuang Mengamalkan Pancasila Dalam Terang Iman*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986, p. 4 .

mereka. Peran PGI menjadi perhatian karena penyusun berasal dari dan melayani di gereja Kristen Jawa (GKJ). Tepatnya, penyusun melayani di GKJ Manahan (Solo), gereja yang terhimpun dalam wadah PGI.

PGI merupakan lembaga gereja yang dibentuk oleh berbagai sinode gereja di Indonesia pada tahun 1984 di Ambon, Maluku. Dan, Sinode GKJ merupakan salah satu pendiri PGI. Lembaga ini merupakan kelanjutan dan pengembangan dari lembaga gerejawi yang telah ada sebelumnya yang bernama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI) yang dibentuk pada tahun 1950. Betapa panjangnya sejarah dan kiprah PGI di Indonesia, termasuk kiprah politiknya. Sekali lagi, mengenai panjangnya kiprah PGI telah dikemukakan oleh Mojau. Oleh karena itu, tesis ini akan membatasi diri pada peran politik PGI dalam masa reformasi. Masa reformasi yang dimaksudkan di sini adalah tahun 1998 sampai dengan tahun 2015.

Tahun 1998 merupakan masa transisi dari orde baru kepada orde reformasi. Pada masa ini, terjadi peristiwa kekerasan dengan intensitas yang sangat tinggi yang tidak pernah diduga akan terjadi di Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Dalam tahun-tahun setelah tahun 1998, kekerasan sebagai masalah sosial tidak kunjung dapat diselesaikan bahkan semakin besar dan memakai wajah yang berganti-ganti: dari kekerasan massa yang dibalut oleh persoalan ekonomi, ras dan politik mengarah pada kekerasan massa yang dibalut oleh persoalan agama, suku, ekonomi dan politik, dan seterusnya. Dalam tahun-tahun ini, ternyata kekerasan menjadi perhatian besar gereja-gereja di dunia seperti WCC. Pada tahun 2000 PGI yang diinspirasi oleh WCC mencanangkan dekade untuk mengatasi kekerasan, *decade to overcome violence*. Peran politik PGI pada era ini diyakini telah mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan era orde baru karena perubahan-perubahan politik yang besar dan dinamika kekerasan yang terjadi di Indonesia.

Pembatasan pertama ini juga meliputi rekan dialog PGI dalam era reformasi, yakni Reinhold Niebuhr. Dalam dialog ini penyusun tidak bermaksud menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dari pihak yang lain. Penulis tidak menjadikan salah satu pihak menjadi penilai yang lebih kompeten bagi pihak yang lain. Penulis bermaksud mendudukan kedua pihak secara sejajar. Masing-masing dapat memberi dan menerima gagasan dari pihak yang lain. Penulis akan menyelidiki gagasan mengenai peran politik

gereja dalam menangani masalah kekerasan dari kedua pihak dan mendialogkannya. Siapa dan mengapa penulis memilih Reinhold Niebuhr sebagai rekan dialog PGI?

Nama lengkap Niebuhr adalah Karl Paul Reinhold Niebuhr. Ia dilahirkan di Wright City, Missouri, Amerika Serikat pada tanggal 21 Juni 1892. Ayahnya, Gustav Niebuhr, adalah seorang pendeta gereja Injili Jerman yang ada di Lincoln's, Amerika Serikat. Niebuhr dikenal sebagai teolog, etikus, intelektual publik, komentator dalam bidang politik dan permasalahan masyarakat dan Profesor di Union Theological Seminary¹⁶. Niebuhr meninggal di Stockbridge, Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 1 Juni 1971. Ia meninggal dalam usia 78 tahun. Ia hidup dalam masa perang dunia I, II dan perang dingin. Namun demikian, pelayanan dan pemikirannya dimulai pada tahun 1920-an, setelah perang dunia I berakhir. Perhatiannya tidak hanya ditujukan kepada Amerika Serikat, tetapi juga kepada Eropa dan dunia.

Orientasi teologi politik Reinhold pada awal pelayanannya adalah pacifisme. Pacifisme merupakan paham teologi politik yang menentang kekerasan dan memperjuangkan perdamaian. Ia juga terlibat dalam organisasi dari kalangan pacifis yang bernama *Fellowship of Reconciliation* (FOR). Bahkan, menurut Wink, Reinhold pernah menjabat sebagai presiden FOR.¹⁷ Organisasi ini lahir semasa perang dunia pertama.¹⁸ Mengenai sikapnya terhadap kekerasan, FOR menolak penggunaan kekerasan dan paksaan.¹⁹ Orientasi dan keterlibatan Reinhold dalam kelompok pacifis sedikit banyak menunjukkan sikapnya terhadap tindak kekerasan dan sikapnya terhadap penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan politik antar negara maupun intra-negara. Sikap yang dimaksud adalah penolakan terhadap tindak kekerasan dan upaya-upaya damai untuk menghentikan kekerasan. Sikap yang demikian, sepertinya dipengaruhi oleh konteks perang dunia pertama. Maksudnya,

¹⁶https://en.m.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Niebuhr, diunduh pada tanggal 19 Mei 2016.

¹⁷ Walter Wink (penyunting), *Damai Adalah Satu-Satunya Jalan: Kumpulan Tulisan Tentang Nir-Kekerasan dari Fellowship of Reconciliation*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), P. Xiii.

¹⁸ Reinhold Niebuhr, *Love and Justice: Selections from the Shorter Writings of Reinhold Niebuhr*. p. 254.

¹⁹ Ibid.

akibat perang dunia pertama yang menghancurkan kehidupan manusia beserta tatanannya. Orientasi teologi politik Reinhold berubah sekitar tahun 1930-an.

Perubahan orientasi politik mengarah kepada realisme. Ia dikenal sebagai tokoh realisme Kristen yang sangat berpengaruh. Realisme merupakan suatu cara pandang untuk menerima keadaan yang sesungguhnya terjadi dengan tidak dipengaruhi oleh emosi dan harapan yang palsu.²⁰ Paulus Sugeng Widjaja mendefinisikan realisme sebagai berikut: "...kita semua memiliki pemahaman bersama tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak, tentang apa yang membuat segala sesuatu terjadi, sehingga kita tahu kuasa macam apa yang perlu diterapkan pada saat apa dalam sistem sosial global untuk membuat peristiwa-peristiwa (di dunia) menghasilkan hal yang terbaik."²¹ Sebagai seorang realis, pada perang dunia kedua, Reinhold mendukung Amerika terjun dalam arena peperangan untuk melawan Jerman dan Jepang. Dalam konteks ini, Reinhold mendukung tindak kekerasan antar negara. Secara ringkas dapat disebutkan bahwa aliran teologi politik Reinhold terdiri dari dua cabang, yakni cabang muda dan cabang tua atau pemikiran Reinhold muda dan pemikiran Reinhold tua. Pemikiran Reinhold yang mana yang akan dibahas di sini?

Dalam studi ini, penulis akan lebih fokus kepada pemikiran realis Reinhold tanpa mempersoalkan apakah berasal dari era Reinhold muda atau Reinhold tua. Mengapa? Pemikiran Reinhold yang realis ini senada dengan pemikiran-pemikiran T.B. Simatupang, Eka Darmaputera dan PGI dalam era orde baru. Mengenai pemikiran realis Reinhold yang mempengaruhinya, T.B. Simatupang menulis:

Namun sebenarnya karya Reinhold Niebuhr telah meninggalkan kesan yang jauh lebih kuat, terutama ketika saya memikirkan ulang, di dalam perspektif teologis, tentang perjuangan nasional bagi kebebasan dan keadilan, di mana saya telah terlibat di dalamnya sejak tahun empat puluhan. Karya Niebuhr, *The Nature and Destiny of Man* memberikan kepada saya sebuah kunci untuk memahami perjuangan bagi pembebasan dan keadilan secara lebih realistis dan sekaligus lebih

²⁰ Oxford Advanced Learner's Dictionary. (New York: Oxford University Press, 2010), p. 1221.

²¹ Paulus Sugeng Widjaja, „Membangun Teologi Politik di Indonesia: Dari Teologi Sukses ke Politik Pelayanan dan Doksologi“ dalam *Jurnal Teologi Gema Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana edisi 59, Teologi dan Politik*. (Yogyakarta: Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana, 2004), p. 60.

memberikan pengharapan. Ia memberikan kepada saya sebuah pemahaman yang segar tentang masyarakat Barat modern, yang pada satu pihak kami perangi dengan hebatnya tetapi, pada pihak yang lain, di dalam beberapa hal berusaha untuk kami samai.²²

Mojau mengatakan bahwa pengaruh Realisme Reinhold meresapi pemikiran Simatupang sejak pertengahan 1970-an sampai dengan akhir 1980-an.²³ Dorongan Niebuhr terhadap gereja-gereja supaya siap berjuang dalam realitas, berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta siap berkompromi dalam politik, bagi Simatupang, sebagai gagasan yang cocok bagi gereja-gereja di Indonesia. Sebagai seorang teolog, Simatupang banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran teologi sosial-politik PGI dalam era orde lama dan orde baru. Ia juga banyak mempengaruhi gagasan-gagasan Eka Darmaputera.²⁴ Pemikiran-pemikiran teologi politik Reinhold-Simatupang-Eka Darmaputera-PGI yang sejajar ini menarik untuk didalami lebih lanjut guna melihat ada tidaknya kesejajaran gagasan PGI-Reinhold dalam mengambil sikap politik untuk menanggapi masalah kekerasan. Pemikiran-pemikiran Reinhold tersebar dalam banyak buku yang telah ditulisnya. Dalam studi ini, penyusun membatasi diri untuk meneliti empat buku yang ditulis Reinhold yakni: (1) *Moral man and Immoral Society*, (2) *Love and Justice*, (3) *The Nature and The Destiny of Man volume I*, dan (4) *The Nature and The Destiny of Man volume II*.

Kedua, kekerasan sebagai masalah sosial yang perlu disikapi. Peran politik PGI dalam menangani masalah kekerasan merupakan sorotan utama di sini. Peran PGI dalam menangani masalah-masalah yang lain tidak dibahas. Bukan maksud penyusun untuk mengabaikan masalah-masalah lain. Masalah-masalah tersebut perlu diperhatikan dengan seksama. Akan tetapi, keterbatasan waktu dan luasnya masalah-masalah politik menuntut penyusun memilih masalah kekerasan. Kekerasan merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan yang menghancurkan kehidupan manusia secara individual dan kelompok. Kekerasan juga mengancam keutuhan hidup bersama bangsa Indonesia.

²² T.B. Simatupang, *Kehadiran Kristen Dalam Perang, Revolusi dan Pembangunan: Berjuang Mengamalkan Pancasila Dalam Terang Iman.*, p. 4 .

²³ Julianus Mojau, *Meniadakan atau Merangkul? Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik di Indonesia.* p 43.

²⁴ Ibid, p. 44.

Barangkali, kekerasan juga berdampak yang positif bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Ketiga, pembatasan mengenai wujud peran politik PGI dalam menangani masalah kekerasan dalam era reformasi. PGI menanggapi kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam era reformasi dengan berbagai cara dan peran. Kepada para korban dan atau pelaku kekerasan, misalnya korban dan atau pelaku kekerasan di Maluku dan Maluku Utara, PGI mendampingi secara pastoral, memberikan advokasi, dan pelatihan-pelatihan penanganan konflik. Bersama dengan pemangku-pemangku kepentingan masyarakat yang lain, PGI juga turut membangun kembali infrastruktur-infrastruktur yang hancur akibat kekerasan. Kajian dalam tesis ini tidak akan ditujukan kepada semua bentuk tanggapan PGI tersebut. Hanya peran politik saja yang akan dibahas dalam studi ini. Wujud peran politik yang diperhatikan dan dipelajari di sini adalah dokumen-dokumen resmi PGI. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen keesaan gereja, keputusan sidang raya PGI di era reformasi, keputusan sidang MPL, surat pernyataan sikap PGI yang dalam hal ini dibuat oleh MPH. Jadi, yang dimaksud dengan peran politik PGI adalah pernyataan resmi berupa keputusan-keputusan sidang dan surat berupa pernyataan sikap atau pesan dari alat-alat kelengkapan PGI yang direkomendasikan dan atau ditujukan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum, mengenai masalah kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam era reformasi dalam rangka menata kehidupan bersama bangsa Indonesia yang adil.

4. Judul Tesis

Rangkaian penjelasan dari latar belakang masalah sampai dengan batasan masalah mengarahkan tesis ini kepada judul:

**Dialog Pemikiran PGI Era Reformasi dan Pemikiran Reinhold Niebuhr
Mengenai Peran Politik Gereja Dalam Menanggapi Masalah Kekerasan**

5. Metode

Tesis ini bermaksud mengkaji teks, yakni dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PGI melalui alat-alat kelengkapannya dan karya-karya tulis Reinhold Niebuhr. Sebagai telah disebutkan dalam rumusan masalah dan batasan masalah, yang dikaji dari teks-teks ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan persoalan kekerasan. Hal-hal yang dimaksud adalah yang terkait dengan cara PGI era reformasi dan Reinhold Niebuhr memahami dan menilai kekerasan, serta cara keduanya memahami politik serta memberikan tanggapan politiknya terhadap masalah kekerasan. Untuk maksud itu, maka penyusun merencanakan langkah-langkah penyusunan tesis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan teks-teks berupa dokumen-dokumen resmi PGI yang diterbitkan antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2015 melalui alat-alat kelengkapannya dan karya-karya tulis Reinhold Niebuhr (empat buku yang telah disebutkan di atas). Sebagian dokumen PGI, seperti Dokumen Keesaan Gereja (DKG) telah diterbitkan untuk kalangan umum. Sebagian dokumen yang lain, seperti kumpulan keputusan dan notulen Sidang Raya PGI, diterbitkan secara terbatas. Sebagian dokumen yang lain yang berupa surat-surat pernyataan MPH tidak diterbitkan, dan dipublikasikan melalui website PGI. Usaha untuk memperoleh dokumen-dokumen resmi PGI penyusun tempuh dengan mengunjungi kantor PGI di Jakarta dan memohon kepada PGI melalui sekretaris umum PGI untuk memperoleh dokumen-dokumen yang dimaksud. Karya-karya tulis Reinhold sudah lama diterbitkan dan dipublikasikan.
2. Langkah kedua adalah memeriksa dan melakukan verifikasi teks-teks yang dimaksud dalam poin pertama. Syarat teks yang memenuhi verifikasi adalah: (1) membahas masalah kekerasan, (2) membahas masalah politik, (3) membahas masalah tanggung jawab sosial gereja atau komunitas Kristen, (4) membahas masalah tanggung jawab politik gereja, (5) membahas persoalan hubungan gereja dan pemerintah.
3. Menemukan jawaban di dalam teks atas dua pertanyaan sebagaimana dinyatakan dalam rumusan masalah. (1) Apa sikap politik PGI era Reformasi dan Reinhold Niebuhr terhadap masalah kekerasan? (2) Mengapa PGI era reformasi dan Reinhold Niebuhr mengambil sikap politik seperti itu dalam menanggapi

masalah masalah kekerasan, dan bagaimana dialog di antara kedua pemikiran tersebut?

4. Mendialogkan pemikiran PGI dan Reinhold Niebuhr mengenai peran politik gereja dalam menanggapi masalah kekerasan.

6. Sistematika

Pada bab I penulis menyajikan kekerasan sebagai salah satu masalah sosial bangsa Indonesia di era Reformasi. Kekerasan, sebagai masalah sosial, telah mengundang berbagai kelompok masyarakat bangsa Indonesia untuk menanggapi. Gereja-gereja di Indonesia, khususnya yang ada dalam wadah PGI, merupakan salah satu komunitas masyarakat yang menanggapi kekerasan, termasuk tanggapan politik: pernyataan sikap yang disampaikan kepada pemerintah. Studi persoalan peran politik PGI era Reformasi dalam menanggapi masalah kekerasan dipandang menjadi semakin menarik apabila didialogkan dengan Reinhold Niebuhr. Itu sebabnya penulis memberi judul studi tesis ini “Dialog Pemikiran PGI Era Reformasi dan Pemikiran Reinhold Niebuhr Mengenai Peran Politik Gereja dalam Menanggapi Masalah Kekerasan”.

Pada bab kedua akan dibahas peran politik PGI dalam era reformasi dalam menanggapi masalah kekerasan: bagaimana PGI menanggapi secara politik masalah kekerasan di Indonesia dalam era reformasi dan mengapa demikian. Cara PGI menanggapi masalah politik tidak lepas dari cara PGI memahami kekerasan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya dan dampak moral dan material kekerasan yang dicermati juga menjadi bagian PGI dalam memahami kekerasan. Bagian lain yang penting yang akan diuraikan di sini adalah PGI dalam upayanya menilai kekerasan secara moral dan teologis.

Pada bab ketiga akan diulas tanggapan politik Reinhold Niebuhr terhadap masalah kekerasan. Tentu pembaca perlu mengetahui lebih banyak tentang Reinhold dalam kaitannya dengan upaya menanggapi masalah kekerasan. Cara Reinhold memahami kekerasan yang berbeda dengan PGI akan dijumpai dalam uraian di sini. Juga akan dijumpai tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan menurut Reinhold yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan PGI.

Demikian juga mengenai dampak kekerasan, pandangan Reinhold memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Kekerasan menurut Reinhold tidak serta merta bisa dinilai sebagai tindakan yang bernilai moral buruk. Berdasarkan landasan pemikiran itulah Reinhold menanggapi secara politik masalah kekerasan. Hal-hal itulah yang akan dibahas pada bab ketiga.

Pada bab keempat akan diuraikan dialog pemikiran PGI era Reformasi dengan pemikiran Reinhold Niebuhr mengenai tanggapan politik mereka dalam terhadap masalah kekerasan.

Bab kelima merupakan kesimpulan. Pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan pada bab pertama sampai dengan bab yang keempat kembali diulas dalam bab ini. Secara singkat akan dikemukakan pemahaman dan penilaian PGI era Reformasi dan Reinhold tentang kekerasan dan hasil dialog pemikiran keduanya. Selanjutnya akan diulas kembali secara singkat pemahaman politik, hubungan Pemerintah dan Gereja, serta sikap politik dari PGI dan Reinhold terhadap masalah kekerasan. Cara PGI era Reformasi dan Reinhold memahami dan menilai kekerasan, dan memahami politik menjadi perpaduan yang memperkaya gereja dalam melandasi sikap politiknya menanggapi masalah kekerasan.

BAB V

KESIMPULAN

1. Pengantar

Penyusun telah berupaya menguraikan dan menganalisis pemikiran-pemikiran PGI pada era reformasi dalam memainkan peran politiknya untuk menanggapi masalah kekerasan. Penyusun juga telah berusaha menguraikan dan menganalisa gagasan-gagasan Reinhold mengenai peran politik gereja dalam menanggapi masalah kekerasan. Pada bab keempat, penyusun berusaha mendialogkan pemikiran PGI dan Reinhold. Pada bab kelima ini penyusun bermaksud meninjau kembali gagasan-gagasan politik PGI, Reinhold, dan dialog diantara keduanya dalam menanggapi masalah kekerasan. Masalah pertama yang ingin dijawab di sini adalah: apa tanggapan politik PGI dan Reinhold sehubungan dengan peristiwa-peristiwa kekerasan? Dan, pertanyaan kedua adalah: apa alasan PGI dan Reinhold menyatakan tanggapan politik seperti itu?

Pada bab kedua, ketiga dan keempat, urutan penulisan tesis ini dimulai dengan memaparkan pemahaman mengenai kekerasan, menyusul kemudian penilaian kekerasan secara moral dan teologis. Setelah itu, dijelaskan upaya-upaya PGI dan Reinhold memahami dan meletakkan dasar untuk menjalankan peran politik. Urutan dan bagian-bagian dalam pemaparan ini merupakan jawaban untuk pertanyaan kedua: apa alasan PGI dan Reinhold menyatakan tanggapan politiknya terhadap masalah kekerasan yang dihadapi? Cara PGI dan Reinhold memahami dan menilai kekerasan merupakan alasan yang kuat bagi keduanya untuk menanggapi secara politik masalah kekerasan yang dihadapi. Cara PGI dan Reinhold memahami dan meletakkan dasar dalam menjalankan peran politik merupakan alasan yang lain yang juga penting bagi keduanya untuk menanggapi masalah kekerasan secara politik. Pada bagian akhir bab kedua, ketiga dan keempat penyusun menguraikan respon politik PGI dan Reinhold terhadap masalah kekerasan. Jadi, bagian akhir dari bab-bab tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan pertama: apa tanggapan politik PGI dan Reinhold sehubungan dengan peristiwa-peristiwa kekerasan?

2. Memahami kekerasan

PGI menyadari benar keadaan bangsa Indonesia pasca Orde Baru yang sedang menghadapi krisis multiwajah yang sangat berat, dan salah satunya adalah kekerasan. Masyarakat bangsa Indonesia baik secara individu maupun kelompok tampak begitu mudah melakukan kekerasan. Masalah ini telah ditanggapi oleh banyak pihak. Upaya menanggapi kekerasan tidak bisa melupakan upaya memahami kekerasan. Dengan memahami kekerasan, pihak-pihak yang berusaha menanggapi mempunyai dasar yang kokoh dalam memainkan perannya menanggapi kekerasan. Dalam upayanya memahami kekerasan, PGI dan Reinhold, paling tidak memperhatikan tiga unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yakni pengertian, faktor-faktor yang mendorong, dan dampak kekerasan.

Pertama, pengertian kekerasan. PGI memahami kekerasan semata-mata kekerasan. Reinhold Niebuhr mengajak PGI memahami kekerasan tidak semata-mata kekerasan. Ia memandang kekerasan sebagai alat bagi para pelakunya. Masing-masing pelaku mempunyai motif dan tujuan dalam menggunakan kekerasan. Dalam perkembangan terkini, kekerasan tidak cukup dipahami sebagai kekerasan. Bahkan, tidak cukup hanya dimengerti sebagai alat. Kekerasan juga dipahami sebagai strategi.

Kedua, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan. PGI menyebutkan paling tidak ada empat faktor yang mendorong terjadinya kekerasan yaitu kepentingan, ketidakadilan, produk-produk hukum, gagal paham kebhinnekaan. Sementara itu, Reinhold menyebutkan bahwa kekerasan paling tidak didorong oleh lima faktor, yakni: kepentingan (*self interest*), *will to power*, *instinct of survival*, *sin of pride* dan ketidakadilan. Faktor kepentingan dan ketidakadilan dengan sangat terang disoroti oleh keduanya. Faktor produk-produk hukum sebenarnya juga disoroti oleh keduanya, tetapi yang paling terang sorotannya adalah PGI. Faktor gagal paham kebhinnekaan merupakan khas sorotan PGI. Sorotan yang demikian sesuai dengan kontesk Indonesia yang memiliki semboyan bhineka tunggal ika. Dan yang menjadi sorotan khas Reinhold dalam dialog ini adalah faktor *will to power*, *instinct of survival*, *sin of pride*. Tali temali antar faktor-faktor tersebut menurut PGI dan Reinhold harus diperhatikan dalam upaya gereja menanggapi masalah kekerasan.

Ketiga, dampak kekerasan. Baik PGI maupun Reinhold, menyadari benar dampak negatif kekerasan dalam segala macam bentuknya. Kekerasan merupakan malapetaka yang sangat besar yang sulit untuk dipahami bahwa malapetaka ini merupakan ulah manusia. Kekerasan merusak dan atau meluluhlantakkan properti, menghancurkan tatanan nilai-nilai- relasi sosial, kehidupan dan seterusnya. Namun demikian, kekerasan juga berdampak positif bagi kehidupan bersama. Ketidakadilan diintervensi oleh kekerasan tertentu, dan kekerasan tertentu dapat menyatukan komunitas yang berkonflik (kekerasan yang terdapat dalam paksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan penegak hukum). Demikianlah dampak positif yang dikemukakan oleh Reinhold.

3. Meninjau kekerasan dari perspektif moral dan teologis

Dari segi moral kekerasan bernilai moral buruk atau immoral. Reinhold dan PGI, keduanya sepakat untuk menilai kekerasan secara demikian. Reinhold mengemukakan alasan, adalah bernilai moral buruk kekerasan yang dilandasi oleh keinginan yang jahat untuk menghancurkan, membinasakan, menyingkirkan, meniadakan hak-hak yang lain. Kekerasan yang dinilai buruk secara moral, demikian Reinhold, memiliki motif dan tujuan tindak yang tidak baik. Jadi pangkal penilaiannya ada pada motivasi dan tujuan tindakan kekerasan. PGI mendasari penilaiannya pada dampak-dampak kekerasan yang menghancurkan kehidupan, merusak relasi antar manusia, manusia dengan ciptaan yang lain, dan yang utama adalah merusak hubungan antara manusia dengan Allah.

Meskipun keduanya sepakat untuk menilai kekerasan sebagai tindakan yang bernilai moral buruk, namun Reinhold berpendapat, kekerasan yang bertujuan baik dan dilandasi motivasi yang baik bernilai moral baik. PGI, tampaknya, tidak setuju dengan penilaian moral Reinhold ini. Layak, memang, untuk kita mengajukan pertanyaan kepada Reinhold terkait penilaian moralnya ini. Kekerasan yang dilandasi oleh motif dan tujuan yang baik, pun, menghancurkan properti, memutuskan relasi, merusak tatanan sosial dan kehidupan. Lantas, apa dasar Reinhold untuk menilai kekerasan yang demikian sebagai bermoral baik kuat?

Bagi PGI semua bentuk kekerasan adalah tindakan yang merusak moral. Jika ditilik dari sikap PGI yang menyetujui Negara menggunakan kekerasan, maka pertanyaan yang perlu diajukan untuk PGI: apakah kekerasan yang demikian juga bernilai moral buruk? Jika kekerasan ini bernilai moral buruk, mengapa PGI menyetujui pemerintah untuk menggunakannya? Jadi, argumentasi Reinhold dan PGI dalam menilai secara moral kekerasan masih mempunyai kelemahan.

Kekerasan dalam sudut pandang teologis PGI dan Reinhold. Secara lugas PGI menilai kekerasan sebagai tindakan dosa, perbuatan melanggar kehendak Allah, dan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Penilaian teologis ini mempunyai dasar biblikal yang kuat. Akan tetapi, pada saat yang sama ia mempunyai landasan biblikal yang lemah. Secara tegas Alkitab melarang tindak kekerasan, dan secara tegas pula ada bagian Alkitab yang “mengajarkan” dan “mendorong” tindak kekerasan. Reinhold juga menilai kekerasan sebagai perbuatan dosa. Kekerasan adalah wajah pemberontakan manusia kepada Allah, dan bentuk kesombongan manusia yang ingin mengatasi Allah. Apa penilaian teologis Reinhold. Penilaian teologis Reinhold yang belum penyusun temukan adalah yang terkait dengan sikap Reinhold menyetujui digunakannya kekerasan. Apakah dasar biblikal Reinhold untuk menyetujui digunakannya kekerasan? Apakah kekerasan yang disetujui oleh Reinhold untuk dipergunakan secara teologis bernilai baik dan atau benar? Kembali, dialog ini menemukan perlunya menguatkan argumentasi-argumentasi teologis baik dari PGI maupun Reinhold.

4. Memahami Politik ala PGI dan Reinhold

Upaya menelusuri bagaimana PGI dan Reinhold memahami kekerasan dan bagaimana keduanya menilai kekerasan dari segi moral dan teologis, berkaitan erat dengan upaya untuk mengerti bagaimana keduanya menanggapi kekerasan secara politik. Memahami bagaimana PGI dan Reinhold memainkan peran politik dalam menanggapi masalah kekerasan tidak lepas dari tiga usaha, yakni bagaimana keduanya memahami politik, dasar teologis bagi gereja dalam melaksanakan peran politik, dan bagaimana gereja menanggapi masalah kekerasan.

Politik adalah upaya manusia untuk mengusahakan kehidupan dan kesejahteraan bersama. Politik adalah bagian integral yang telah diamanatkan Allah kepada manusia untuk merealisasikan hidupnya baik secara perorangan maupun secara bersama-sama (band. Kejadian 1: 26; 2:15). Politik dalam arti yang luas adalah merupakan alat dan aksi baik secara pribadi maupun bersama-sama untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama menuju pada situasi yang lebih adil dan benar-benar sesuai dengan kehendak Allah (band. Yeremia 29:7).

Demikianlah definisi politik menurut PGI. Politik, bagi Reinhold, merupakan tempat bertemunya kata hati dan kekuasaan; area di mana faktor-faktor etis dan paksaan (*coercion*) saling bersinggungan, bahkan saling meresapi; wilayah di mana kompromi-kompromi yang tidak mudah dan bersifat sementara dibuat.

PGI memandang politik secara positif dan terkesan mudah untuk dilaksanakan. Ia merupakan alat dan aksi dalam kehidupan bersama manusia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Politik adalah suatu upaya bersama manusia yang dikehendaki oleh Allah untuk mengelola kehidupan dan kesejahteraan bersama. Empat unsur dalam politik yang ditekankan oleh PGI adalah usaha manusia, amanat Allah, tujuan untuk kehidupan dan kesejahteraan bersama, dan cara mewujudkan yang baik dan tidak menyeleweng dari jalan Tuhan.

Sementara itu, Reinhold memahami politik sebagai seni untuk mengelola kehidupan bersama. Reinhold sepaham dengan PGI dalam memahami politik sebagai upaya manusia dalam menata kehidupan bersama. Di dalam politik, Reinhold melihat adanya perjumpaan, saling meresapi, kompromi-kompromi yang sulit dan bersifat sementara unsur-unsur dalam politik. Di sini Reinhold menyatakan ketidaksetujuannya terhadap PGI yang melihat politik sebagai tugas yang terkesan mudah. Meskipun ia melihat ada hal positif dalam politik, tetapi ia tetap melihat adanya hal-hal negatif dan sulit di dalam politik.

Reinhold memperhatikan dengan seksama faktor etis, kekuasaan, paksaan, kata hati dalam politik. Empat faktor itulah, paling tidak, yang menurut Reinhold tidak boleh diabaikan dalam menyelidiki persoalan politik. Sebagai seni mengelola kehidupan bersama, di dalam politik, faktor-faktor tersebut saling berjumpa, mempengaruhi, dan berkompromi. Upaya ini, menurut Reinhold bukanlah upaya yang mudah, tetapi upaya yang rumit dan kompleks.

Dalam memahami politik, Reinhold kurang sekali dalam memperhatikan nilai-nilai Kristiani. Pandangan yang demikian ini yang tidak disepakati oleh PGI dan oleh sebab itu PGI memilih untuk memahami politik dengan sangat menekankan nilai-nilai Kristiani. Dari dialog PGI dan Reinhold ditemukan bahwa masing-masing mempunyai kelemahan dalam memahami politik: yang pertama melihat politik secara positif yang berlebihan, yang kedua kurang memperhatikan dan menekankan nilai-nilai Kristiani. Dari dialog ini ditemukan di mana keduanya bisa saling melengkapi dalam memahami politik, serta saling melengkapi dalam menggambarkan faktor-faktor penting dalam politik.

Bagi Reinhold, adalah wajar dan semestinya gereja berkiprah dalam kehidupan politik. Gereja merupakan warga masyarakat. Sama seperti warga masyarakat yang lain, gereja bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Jadi, dasar bagi gereja untuk berkiprah dalam kehidupan politik sama dengan dasar berpolitik warga masyarakat yang lain. Inilah dasar bagi gereja untuk berpolitik menurut Reinhold. PGI mendasari peran politiknya secara teologis. Gereja dipanggil untuk melanjutkan misi Yesus Kristus. Tanggung jawab politik gereja merupakan salah satu tanggung jawab yang diemban oleh gereja dalam melanjutkan misi Yesus Kristus. Misi Yesus Kristus, bagi PGI, merupakan realisasi kasih Allah kepada manusia yang begitu besar meskipun manusia dipenuhi oleh kekerasan dan dosa. Melalui dialog PGI dan Reinhold gereja mengetahui pentingnya dasar baik teologis maupun sosiologis dalam melaksanakan peran politiknya.

5. Menanggapi masalah kekerasan secara politik

Lalu apa tanggapan politik gereja terhadap masalah kekerasan yang dihadapinya? Di sini gereja memperoleh banyak jawaban. PGI memberi tiga jawaban. Pertama, Gereja sebagai nabi yang bisu. Di sini kekerasan ditanggapi dengan tidak menanggapi. Kedua, Gereja sebagai nabi yang ragu. Di sini kekerasan ditanggapi dengan bahasa yang samar. Gereja menyinggung kekerasan dalam pesannya kepada Negara tetapi pandangannya yang jelas mengenai kekerasan yang dimaksud: diterima atau ditolak, dikecam atau dipuji, tidak jelas. Dan gereja sebagai nabi yang berseru. Di sini kekerasan ditanggapi dengan sangat jelas oleh gereja yakni ditolak dan dikecam. Mendorong supaya pemerintah segera menyelesaikannya. Kedua tanggapan yang pertama tidak sesuai dengan landasan pikir yang kuat. Tanggapan itu tidak sesuai

dengan cara PGI memahami dan menilai kekerasan, tidak cocok, juga, dengan dasar teologis peran politik PGI.

6. Kemungkinan-Kemungkinan yang bisa Dilakukan Gereja

Dengan memperhatikan konteks Indonesia dalam era reformasi, khususnya pada era tahun 2010-an, di mana kekerasan individual dan kelompok sama-sama berkembang, maka diskusi peran politik dalam menanggapi masalah kekerasan perlu diseimbangkan antara yang individual dan yang kelompok.

Secara teologis maupun sosiologis gereja-gereja di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang ada, termasuk di dalamnya masalah kekerasan. Oleh sebab itu gereja-gereja di Indonesia dalam era reformasi pun di dorong untuk memahami sebaik-baiknya seluk-beluk kekerasan. Dialog lintas ilmu adalah suatu keniscayaan untuk meneropong kekerasan agar diperoleh pemahaman yang semakin luas tentangnya. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh PGI di awal masa reformasi. Harapannya, kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam segala bentuknya ini bukan sekedar perlu diperhatikan dan dipahami, tetapi juga perlu disikapi secara politik oleh gereja.

Dialog PGI dan Reinhold menyadarkan pentingnya gereja-gereja di Indonesia mengamati produk-produk hukum yang ada pada jamannya. Tidak semua produk hukum adil: mempertimbangkan, mengakui, dan mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok yang diatur di dalamnya. Kemungkinan yang terjadi adalah bahwa produk hukum dibuat untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu yang mempunyai kekuatan dan atau kekuasaan sosial dan ekonomi yang kuat. Pengalaman Reinhold dan PGI, juga, menunjukkan adanya produk hukum yang memicu terjadinya dan membenarkan tindak kekerasan.

Daftar Pustaka

- Adeney, Bernard T. *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Anshar, Maria Ulfah. *Perempuan Muslim Indonesia Melawan Kekerasan, Menatap masa Depan, dalam Menjadi Indonesia. 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*. Jakarta: Mizan, 2006.
- Aritonang, Jan S. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Banawiratma, J.B. Panggilan Mengikuti Kristus di Tengah-tengah Kekerasan, dalam *Agama-agama dan Rekonsiliasi*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2005.
- Bidang Marturia PGI, Aspek-aspek dan Problematika Perda Syariah, dalam *Diskursus Hubungan Agama dan Negara. Respon Gereja terhadap Perda Syariah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2014.
- Budiman, Calvin S. *7 Model Kristologi Sosial*. Malang: Literatur SAAT, 2013.
- Clinebell, Howard. *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*. Yogyakarta dan Jakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 2002.
- Darmaputera, Eka. Bukan Keterpisahan, Tapi Kemitraan. Beberapa Catatan Sekitar Hubungan Agama dan Negara: Refleksi Seorang Kristen Protestan, dalam *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2001. Darmaputera, Eka. *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia: Teks-teks terpilih Eka Darmaputera*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Fisher, Simon dkk. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Bertindak*. Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Gie, Kwik Kian. *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hardiman, Fransisco Budi. Struktur Kekerasan Massa: Diteropong Dengan Teori Tindakan Kolektif, dalam *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

- Harris, Richard. "Introduction", dalam Richard Harris dan Stephen Platten, *Reinhold Niebuhr and Contemporary Politics : God and Power*. New York : Oxford University Press, 2010.
- Lamert, Charles. *Why Niebuhr Matter*. London. New Haven : Yale University Press, 2011.
- Van Liere, Lucien. *Memutus Rantai Kekerasan: Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi dan Terorisme*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Milgrom, Jeremy. "Biarlah Cintamu Kepadaku Mengalahkan Bencimu kepadanya: Antikekerasan dan Yudaisme Modern" dalam Daniel L. Smith-Christopher (ed), *Lebih Tajam Dari Pedang: Refleksi Agama-agama Tentang Paradoks Kekerasan*. Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 2005.
- Mojau, Julianus. *Meniadakan atau Merangkul? Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- _____. *Teologi Politis T.B. Simatupang*, dalam Jurnal Teologi Gema edisi 59. Yogyakarta: Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, 2004.
- Muhammad, K.H. Husein. Kebijakan Publik Diskriminatif Mengabaikan Demokrasi Substansial dan Keadilan, dalam *Diskursus Hubungan Agama dan Negara. Respon Gereja terhadap Perda Syariat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2014.
- Ngelow, Zakaria J. *Kekristenan dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Niebuhr, Reinhold. *Moral man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics*. New York: A Touchstone Book, 1995.
- _____. *The Nature and Destiny of Man: Christian Interpretation: Volume one: Human Nature*. Louisville: Westminster John Knox Press, 1996.
- _____. *The Nature and Destiny of Man: A Christian Interpretation: Volume II: Human Destiny*. Louisville: Westminster John Knox Press, 1996.
- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, *Lima Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (LDKG-PGI): Keputusan Sidang Raya XII PGI, Jayapura, 21-30 Oktober 1994*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.

- _____. *Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (DKG-PGI): Keputusan Sidang Raya XIV PGI, Wisma Kinasih, 29 November – 5 Desember 2004*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- _____. *Potret dan Tantangan Gerakan Oikumene: Laporan Penelitian Survei Oikumene PGI 2013*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Sairin, Weinata. *Pesan-Pesan Kenabian di Pusaran Zaman: Dokumen terpilih PGI Seputar reformasi dan Isu Sosial Kemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Simatupang, TB. *Kehadiran Kristen Dalam Perang, Revolusi dan Pembangunan: Berjuang Mengamalkan Pancasila Dalam Terang Iman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986.
- Sudiarja, A. Negara Hukum dan Civil Disobidience, dalam *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Widjaya, Paulus Sugeng. Membangun Teologi Politis di Indonesia (dari Teologi Sukses ke Politik Pelayanan dan Doksologi), dalam jurnal *Teologi Gema* edisi 59, *Teologi dan Politik*. Yogyakarta: Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana, 2004.

- Yewangoe, Andreas A. Visi Kristen Mengenai Politik, dalam John Campbell-Nelson, Julianus Mojau dan Zakaria J. Ngelow (eds), *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca orde Baru*. Makasar: Oase Intim, 2013.
- Yoder, John Howard. *The Politics of Jesus*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co, 1994.
- _____. *The Original Revolution: Essays on Christian Pacifism*. Scottdale: Herald Press, 1971.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Daftar Keputusan dan Notulen Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 14-21 November 2001, Parapat, Sumatera Utara*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2002.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Daftar Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 7-13 Oktober 2002, Tana Toraja, Sulawesi Selatan*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2003.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Daftar Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 2-8 Oktober 2003, Bandung, Jawa Barat*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2003.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 20-25 Maret 2005 Kuta, Bali*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2005.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 23-26 Januari 2006 Pekanbaru, Riau*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2006.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 23-26 Januari 2007 Manado*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2007.

- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan keputusan dan notulen Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 25-28 Februari 2008 Jakarta*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2008.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 16-19 Februari 2009 Makasar*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2009.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Notulen Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 1-4 Maret 2010 Cisarua Bogor*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2010.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Notulen Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 4-8 Februari 2011 Tobelo, Halmahera Utara*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2011.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Notulen Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 26-30 Januari 2012 M elonguane, Talaud*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2012.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Notulen Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 24-28 Januari 2013 Kupang, Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2013.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Notulen: Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 16-21 Januari 2014 Merauke, Papua*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2014.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Notulen Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 6-9 Maret 2015 Malinau*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2015.

- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Notulen Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 22-26 Januari 2016 Parapat*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2016.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dari Palangkaraya ke Jakarta: Perjalanan Pelayanan PGI 2000-2004*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2004.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dari Kinasih Ke Mamasa: Sebuah Catatan Perjalanan Pelayanan PGI Masa Bakti 2004-2009*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2009.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dari Mamasa ke Gunung Sitoli: Catatan Perjalanan PGI 2010-2014*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2014.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Daftar Keputusan Sidang Raya XIII Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia: 24-31 Maret 2000 Palangka Raya, Kalimantan Tengah*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2001.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Notulen Sidang Raya XIV Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia: 29 November – 5 Desember 2004 Wisma Kinasih, Caringin, Bogor*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2005.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Notulen Sidang Raya XV Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia: 19-23 November 2009 Mamasa, Sulawesi Barat*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2010.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Notulen Sidang Raya XVI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia: 11-16 November 2014 Tano Niha, Nias, Sumatera Utara*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2015.

- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dokumen Keesaan Gereja (DKG) 2000*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2001.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dokumen Keesaan Gereja (DKG) 2000-2004*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2001
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dokumen Keesaan Gereja (DKG) 2004-2009*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2007.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dokumen Keesaan Gereja (DKG) 2009-2014*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2010.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dokumen Keesaan Gereja (DKG) 2014-2019*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, ...
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Potret dan Tantangan Gerakan Oikumene: Laporan Penelitian Survei Oikumene PGI 2013*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2015.
- Republik Indonesia, Tim Lembaga Informasi Nasional (LIN-RI). *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Impedham, 2004.
- Adeney, Bernard T. Agama dan Politik: Interaksi dalam Sejarah Dunia Umumnya dan Indonesia Khususnya, dalam Jurnal Teologi Gema Duta Wacana, edisi 59 tahun 2004. Yogyakarta: Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, 2004
- Rozi, Syafuan dkk. *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Iman dan Politik dalam era Reformasi di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002,
- Sirait, Saut. *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994

Swartley, Willard M. *Slavery Sabbath War and Women: Case Issues in Biblical Interpretation*. Pennsylvania Waterloo: Herald Press, 1983.

Wink, Walter (penyunting). *Damai Adalah Satu-Satunya Jalan: Kumpulan Tulisan Tentang Nir-Kekerasan dari Fellowship of Reconcillatio*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.

SURAT-SURAT

Pesan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia kepada Pimpinan dan Para Anggota DPR RI dan MPR RI Berkenaan Dengan Pelaksanaan Sidang Umum MPR RI 1-11 Maret 1998. Tidak diterbitkan

Seruan Bersama Majelis-Majelis Agama di Indonesia Berkenaan Dengan Berbagai Krisis yang Melanda Bangsa Indonesia tahun 1998. Tidak diterbitkan.

Surat Pesan Sidang MPL Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Kinasih, Caringin-Bogor, 16-18 November 1999. Tidak diterbitkan.

Surat pernyataan sikap PGI No : 109/PGI-XV/2013 perihal penahanan petani di Hutan Kemenyan Pandumaan yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono, tanggal 5 Maret 2013, tidak diterbitkan.

Salinan siaran pers PGI tanggal 13 Oktober 2015, tidak diterbitkan.

KAMUS

C.P. Chaplin, 1995, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Oxford Advanced Learner's Dictionary, New York: Oxford University Press, 2010.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam, diunduh tanggal 15 Nopember 2017.

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diunduh pada tanggal 19 April 2016.

©UKDW